

# **BAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)**

**TAHUN  
2023**



**DINAS PETERNAKAN  
PROVINSI NTT**



[www.https://www.disnak.nttprov.go.id/](https://www.disnak.nttprov.go.id/)

## URUSAN PILIHAN

### DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT

#### 3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

##### 3.1.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output			Outcome	Benefit	Impact
			Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi 2023			
1.	Tercapainya peningkatan populasi ternak besar	Persentase Pertumbuhan populasi ternak populasi ternak besar ➤ Sapi ➤ Kerbau ➤ Kuda	6.1%  ➤ 1.175.615 ➤ 167.915 ➤ 118.132	7.0%  ➤ 1.330.956 ➤ 184.950 ➤ 134.073	6.26  ➤ 1.198.159 ➤ 176.793 ➤ 125.221	Meningkatnya ketersediaan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda)	Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah
2.	Tercapainya peningkatan populasi ternak kecil	Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil ➤ Kambing ➤ Domba ➤ Babi	8.7%  ➤ 991.953 ➤ 74.976 ➤ 2.132.124	11.0%  ➤ 1.175.738 ➤ 91.868 ➤ 3.580.772	9.33%  ➤ 1.099.336 ➤ 82.373 ➤ 2.249.338	Meningkatnya ketersediaan ternak kecil (kambing, domba dan babi)		
3.	Tercapainya peningkatan populasi ternak unggas	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas	6.5% 25.114.150	6,9% 27.664.137	7,05% 27.233.317	Meningkatnya ketersediaan ternak unggas		
4	Tercapainya peningkatan persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	80	90%	90%	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian		
5	Tercapainya peningkatan persentase jumlah ternak yang sehat	Persentase ternak yang sehat	80%	80%	80%	Meningkatnya kesehatan hewan		
6	Tercapainya peningkatan jumlah unit usaha panga nasal ternak yang memenuhi standar	Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	43	38	48	Meningkatnya unit usaha panga nasal hewan yang memenuhi standar		

Kupang, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Peternakan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Johanna E. Lisapaly, S.H., M.Si**

Pembina Utama

19610110 198903 2 015

### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

#### 3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah</li> <li>• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023</li> <li>• Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023</li> <li>• Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022</li> <li>• Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas</li> </ul>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp. 22.480.116.492</b>	<b>Rp. 18.434.109.060 (82%)</b>		
		Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>Input:</b> Rp. 331.133.220  <b>Output:</b> Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov, NTT Tahun 2023  <b>Outcome:</b> Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kineja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov. NTT Tahun 2023 100%	<b>Input:</b> Rp. 236.474.220 (71.41%)  <b>Output:</b> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar kineja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov, NTT Tahun 2023  <b>Outcome:</b> Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kineja SKPD (LKIP, LKPJ dan LPPD) Dinas Peternnakan Prov. NTT Tahun 2023	Ketersediaan anggaran terbatas sehingga untuk beberapa kegiatan operasional tidak dicairkan. Kegiatan operasional tersebut antara lain: belanja alat/bahan kegiatan kantor dan belanja perjalanan dinas	Efisiensi pemanfaatan alat/bahan kantor dan sinergi perjalanan dengan kegiatan di program/kegiatan yang lain
		Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	<b>Input:</b> Rp. 14.876.965.000	<b>Input:</b> Rp. 12.486.383.104 (83.93%)	Tidak tercapainya realisasi anggaran karena realisasi penerimaan PPPK	Menghitung Kembali kondisi riil ASN untuk perencanaan tahun

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pernakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022		<b>Output:</b> Pembayaran gaji dan tunjangan ASN  <b>Outcome:</b> Gaji dan tunjangan ASN	<b>Output:</b> Tersdianya gaji dan tunjangan ASN Dinas peternakan Prov. NTT Tahun 2023  <b>Outcome:</b> Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas peternakan Prov. NTT Tahun 2023	tidak sesuai proyeksi.	berikutnya.
		Kegiatan adminitrasi umum perangkat daerah	<b>Input:</b> Rp. 255.588.751  <b>Output:</b> Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor</li> <li>➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>➤ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>➤ Penyediaan bahan material</li> <li>➤ Penyelenggaran rapat koordinasi dan</li> </ul>	<b>Input:</b> Rp. 133.417.575 (52.20%) . <b>Output:</b> Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor</li> <li>➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>➤ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>➤ Penyediaan bahan</li> </ul>	Ketersediaan anggaran terbatas sehingga untuk program/kegiatan ini hanya dicairkan 52.20% (Kegiatan perjalanan dinas tidak dicairkan)	Efisiensi pemanfaatan alat/barang dan sinergi perjalanan dengan kegiatan di program/kegiatan yang lain

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>konsultasi SKPD</p> <p><b>Outcome:</b> Tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 100%</li> <li>➤ Barang cetakan dan penggandaan 100%</li> <li>➤ Bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 100%</li> <li>➤ Bahan material 100%</li> </ul> <p>Terselenggaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rapat rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD 100%</li> </ul>	<p>material</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</li> </ul> <p><b>Outcome:</b> Tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor</li> <li>➤ Barang cetakan dan penggandaan</li> <li>➤ Bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan</li> <li>➤ Bahan material</li> </ul> <p>Terselenggaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rapat rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD</li> </ul>		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<p><b>Input:</b> Rp. 40.356.000</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p><b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah</p>	<p><b>Input:</b> Rp. 12.768.000 (31,64%).</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p><b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah</p>	Rendahnya realisasi karena anggaran untuk belanja modal personal computer tidak dicairkan	Di alokasikan pada tahun 2024
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p><b>Input:</b> Rp. 6.698.209.521</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Outcome:</b> Tersedianya: ➤ Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	<p><b>Input:</b> Rp. 5.449.409.441, (81,36%).</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Outcome:</b> Tersedianya ➤ Jasa</p>	Rendahnya realisasi karena kelebihan anggaran untuk jasa tenaga pelayanan umum kantor.	Dilakukan penyesuaian dengan perhitungan Kembali sesuai kondisi riil

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			➤ Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➤ Jasa tenaga Pelayanan Umum Kantor		
.		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<b>Input:</b> Rp. 227.864.000  <b>Output:</b> ➤ Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ➤ Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  <b>Outcome:</b> ➤ Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6 100%	<b>Input:</b> Rp. 102.813.220 (58,05%)  <b>Output:</b> ➤ Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ➤ Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  <b>Outcome:</b> ➤ Tersedianya kendaraan yang layak dan	Rendahnya realisasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan, gedung kantor dinas dan UPT karena keterbatasan anggaran (tidak dicairkan)	Efisiensi pemanfaatan kendaraan dinas dan menjaga keberadaan gedung kantor yang ada.

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			➤ Terpeliharanya gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT Lingkup Peternakan 100%	memenuhi syarat serta STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6 ➤ Terpeliharanya gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT Lingkup Peternakan		
2		<b>Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>	<b>Rp. 5.811.385.664</b>	<b>Rp. 4.887.880.547 (84,11)</b>		
		Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan serta pakan kewenangan provinsi	<b>Input:</b> Rp. 5.811.385.664  <b>Output:</b> Terlaksananya: ➤ Pengadaan ternak babi ➤ Terlaksananya pengadaan ternak kambing ➤ Pengadaan pakan ternak  <b>Outcome:</b> Tersedianya ➤ Ternak babi 1.000 ekor ➤ Ternak kambing 75 ekor ➤ Pakan ternak 5.000 Kg	<b>Input:</b> Rp. 4.887.880.547 (84,115%)  <b>Output:</b> Terlaksananya: ➤ Pengadaan ternak babi ➤ Pengadaan pakan ternak ➤ Terlaksananya pengadaan ternak kambing  <b>Outcome:</b> Tersedianya ➤ Ternak babi 1.000 ekor ➤ Ternak kambing 75 ekor	➤ Keterbatasan anggaran (tidak dicairkan) untuk Pengadaan ternak babi untuk 19 kelompok ➤ Pengurangan belanja pakan karena berkurangnya populasi ternak akibat penyakit	➤ Mengupayakan diusulkan Kembali ditahun berikutnya ➤ Menganggarkan belanja pakan sesuai kondisi riil jumlah ternak.

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			➤ Terwujudnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan 100%	➤ Pakan ternak 5.000 Kg ➤ Terwujudnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan		
3		<b>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>	<b><i>Input:</i></b> <b>Rp. 12.318.000</b>	<b><i>Input:</i></b> <b>Rp. 4.452.000</b> <b>(36,14%)</b>		
		Kegiatan penataan prasarana pertanian	<b><i>Input:</i></b> <b>Rp. 12.318.000</b>  <b><i>Output:</i></b> Terlaksananya: ➤ Kegiatan siaran peternakan ➤ Pembinaan/penguatan verifikasi/klarifikasi serta penilaian kemampuan berkelompok petani ternak	<b><i>Input:</i></b> <b>Rp. 4.452.000</b> <b>(36,14%)</b>  <b><i>Output:</i></b> Terlaksananya: ➤ Kegiatan siaran peternakan ➤ Pembinaan/penguatan verifikasi/klarifikasi serta penilaian kemampuan	Perjalanan pengambilan data tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran (tidak dicairkan)	Pengambilan data lewat <i>zoom meeting</i>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<b>Outcome:</b> Tercapainya jumlah siaran rencana pengembangan prasaran Kawasan dan komoditas pertanian	berkelompok petani ternak  <b>Outcome:</b> Tercapainya jumlah siaran rencana pengembangan prasaran Kawasan dan komoditas pertanian		
4		<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>668.694.188</b>	<b>450.873.221 (67,43)</b>		
		Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<b>Input:</b> Rp. 168.694.519  <b>Output:</b> Terlaksananya: ➤ Analisis risiko bagi unit usaha pemasuk hewan dan produk hewan ➤ Sertifikasi Unit Usaha Produk asal ternak ➤ Terdistribusinya obat hewan ke Kabupaten/Kota  <b>Outcome:</b> Tersedianya : ➤ Data Unit Usaha	<b>Input:</b> Rp. 49.918.640 (29,59%)  <b>Output:</b> ➤ Analisis risiko di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah  <b>Outcome:</b> ➤ Tersedianya 6 Unit Usaha yang di analisis risiko di Provinsi Jawa Timur dan 3 Unit usaha yang di analisis risiko di Provinsi Jawa Tengah	Keterbatasan anggaran (tidak dicairkan) untuk: ➤ Perjalanan dalam rangka sertifikasi NKV. ➤ Biaya pengiriman obat hewan. Sedangkan Perjalanan analisis risiko hanya dicairkan untuk perjalanan ke Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan Provinsi yang lain tidak dicairkan	➤ Pelaksanaan sertifikasi NKV disinergikan dengan APBN. ➤ Biaya pengiriman ditanggung oleh Kabupaten/Kota ➤ Untuk unit usaha yang belum di analisis resiko dialokasikan di tahun 2024

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>yang sudah di analisis risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Data Unit usaha yang memiliki sertifikat NKV</li> <li>➤ Jumlah obat hewan yang terdistribusi</li> </ul>			
		Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas provinsi	<p><b>Input:</b> Rp. 164.686.700</p> <p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar wilayah NTT</li> </ul> <p><b>Outcome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tersedianya laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk asal ternak wilayah NTT yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis peternakan 1 dokumen</li> </ul>	<p><b>Input:</b> Rp. 97.812.000 (59,39%)</p> <p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar wilayah NTT</li> </ul> <p><b>Outcome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tersedianya laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk asal ternak wilayah NTT yang memenuhi persyaratan</li> </ul>	Keterbatasan anggaran (tidak dcairkan) untuk perjalanan dinas	sinergi perjalanan dengan kegiatan di program/kegiatan yang lain

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				administratif dan teknis peternakan 1 dokumen		
		Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<b>Input:</b> Rp. 335.321.969  <b>Output:</b> ➤ Telaksananya Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet  <b>Outcome:</b> Tersedianya sertifikat, kalibrasi dan sistim jaminan mutu laboratorium 100%	<b>Input:</b> Rp. 303.142.581 (90,40%)  <b>Output:</b> ➤ Telaksananya Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet  <b>Outcome:</b> Tersedianya sertifikat, kalibrasi dan sistim jaminan mutu laboratorium 100%		

Kupang, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Peternakan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si.**

Pembina Utama

NIP 19640110 198903 2

**3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Pada sasaran strategis Penyediaan dan pengembangan sarana petanian, Penyediaan pengembangan praserana pertanian dan Pengendalian kesehatan masyarakat dan kesehatan masayakat veteriner dapat terlaksana di tahun 2023 dan terakomodir pada program dan kegiatan dalam Dokumen Anggaran Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2023

**3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Klasterisasi wilayah pengembangan ternak besar berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktifitas ternak besar, kecil dan unggas serta pengembangan pusat – pusat perbibitan ternak.	1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan.
2	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan.	2. Peratuaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan.
3	Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.	3. Peraturan Gubernur Nusa Taenggara Timur Nomor 43 a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan.
4	Menguatkan pembinaan dan pengawasan veteriner dalam rangka penjaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH).		

3.3.Tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPI Gubernur NTT tahun ajaran 2022.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemanfaatan anggaran perlu dioptimalkan, terutama pada program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, dengan penetapan output dan outcome yang terkait langsung dengan kegiatan, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja.	Pemanfaatan anggaran untuk program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja peningkatan populasi ternak melalui pengadaan ternak babi dan kambing karena keterbatasan APBD. Pengadadaan ternak lainnya diupayakan juga melalui APBN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan
2	Kegiatan pengadaan ternak sapi ongol yang rencananya akan diserahkan ke 4 (empat) kelompok di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan pengadaan ternak kambing untuk 13 kelompok dengan jumlah 325 ekor kambing lokal perlu dilanjutkan pada tahun 2023, dengan pemilihan pihak ketiga/rekanan yang lebih baik.	Kegiatan pengadaan ternak sapi Sumba Ongole telah diupayakan namun belum terlaksana karena keterbatasan anggaran, dan pengadaan ternak kambing telah dilaksanakan sebanyak 75 ekor untuk 3 kelompok	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Peternakan
3	Perlu dilanjutkan melalui perencanaan yang lebih baik, pengadaan vaksin dan obat-obatan hewan (terutama ternak besar) ke kabupaten-kabupaten target dalam rangka kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Perencanaan penganggaran pengadaan vaksin dan obat-obatan hewan serta pendistribusian ke kabupaten-kabupaten telah dilakukan dalam APBD juga APBN, karena keterbatasan anggaran APBD tahun 2023, pelaksanaanya melalui APBN.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pternakan





